



EVALUASI KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN TRIWULAN II

@
@@@
@@@@
@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@
@@@
@

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
JL. GATOT SUBROTO NO.2 KEDIRI - TABANAN
TLP.(0361) 811171
2024**

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur dapat menyusun Evaluasi Kinerja Program Triwulan II Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Evaluasi kinerja ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil. Evaluasi kinerja ini memberikan gambaran kinerja BPBD dalam pembangunan daerah.

Rampungnya evaluasi kinerja tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga evaluasi kinerja ini selesai tepat pada waktunya.

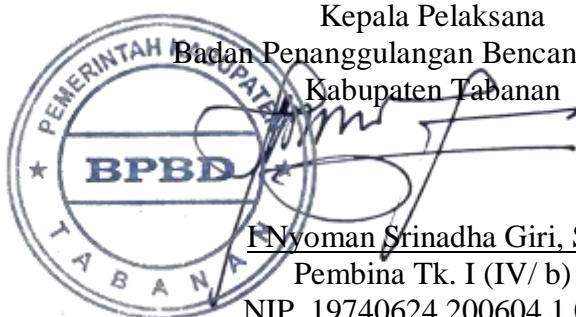
Dengan berbagai keterbatasan yang ada, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan untuk dapat mewujudkan tujuan, sasaran strategis, dan program yang tertuang dalam Rencana Startegis dan rencana kerja Tahun 2024.

Tabanan, 2 Juli 2024

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tabanan



Nyoman Srinadha Giri, S.E

Pembina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tujuan	2
BAB II RENCANA KERJA.....	3
2.1 Pengukuran IKT.....	3
2.2 Pengukuran IKU	4
2.3 Pengukuran IKP	4
2.4 Pengukuran IKK	5
BAB III KINERJA PEMBANGUNAN	6
3.1 Capaian Kinerja Pembangunan.....	6
3.2 Kinerja Keuangan.....	10
BAB IV PENUTUP.....	11
4.1 Kesimpulan	11
4.2 Saran	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan amanah UUD 1945 sehingga Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Indonesia Tangguh Bencana (*Resilien*) untuk Pembangunan Berkelanjutan 2045. Perencanaan pembangunan telah diarahkan untuk adanya sinergisitas prioritas pembangunan pusat dan daerah. Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terkordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dengan baik.

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2040, dimana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2). Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontigensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekuntruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali telah sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan, sehingga dalam kebencanaan sesuai prioritas ketiga yakni jaminan sosial dan ketenagakerjaan maka pemerintah daerah terus berinovatif dalam mewujudkan daerah aman dan nyaman sehingga perekonomian dan investasi dapat berkembang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan strategi dalam manajemen bencana dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2022 yaitu : 1). Pelayanan informasi (edukasi) rawan bencana kepada multi pihak, 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk investasi pembangunan, 3). Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana untuk pulih lebih cepat (*risilien*).

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya menangani isu strategis yang dihadapi dengan program prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD agar multi pihak (*stakeholder*) semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadi tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Amanah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010-2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *good and clean government* yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, dimana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan yang didukung oleh aparatur berakhlik.

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 maka untuk mengukur keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan prioritas pembangunan maka setiap triwulan dilakukan evaluasi atas kinerja perangkat daerah sesuai urusan yang diembannya.

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
5. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
6. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/292/01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

1.3. Tujuan.

1. Memberikan gambaran umum potensi rawan bencana di wilayah Kabupaten Tabanan.
2. Memberikan informasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung misi pertama RPJMD Semesta Berencana dalam mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman).

II. RENCANA KERJA

3.1 Pengukuran indikator Kinerja Tujuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja tujuan. Adapun *stakeholder* (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Sosial P3A, Dinas Perhubungan) yang berperan dalam pencapaian indikator menurunkan Indeks Risiko Bencana yang dikukur dari evaluasi 71 indikator dan 284 pertanyaan penilaian indikator ketahanan daerah yang nilainya dikeluarkan oleh BNPB. Adapun target kinerjanya berikut ini.

Tujuan BPBD	Indikator tujuan	Formula	Target
Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Hasil evaluasi 71 indikator dan 284 pertanyaan penilaian IKD dari BNPB	153,43%
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil Evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	85,00%

2.2 Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja utama. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian 2 (dua) indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, dan Satgas. Adapun target kinerjanya berikut ini.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	Realisasi tanggap kebencanaan dibagi usulan dan pengaduan yang masuk dikalikan 100	100%
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	Nilai reviu LKjIP dari Inspektorat	A

2.3 Pengukuran Indikator Kinerja Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja program. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian 2 (dua) indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, Satgas, dan pentahelik. Adapun target kinerjanya berikut ini.

Progam	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Realisasi anggaran dalam mendunjang pelayanan setiap triwulan dibagi target anggaran triwulan dikalikan 100	100%
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Realisasi penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana dibandingkan dengan usulan atau pengaduan masyarakat yang masuk dikalikan 100	100%

Sumber : DPA, 2024

2.4 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian 8 (delapan) indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, dan Satgas. Adapun target kinerjanya berikut ini

Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan edukasi dan informasi rawan bencana	10 kecamatan
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan	Jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan	1 dok

Bencana	bencana yang terdata	bencana yang dihasilkan	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Jumlah jenis dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja dihasilkan setahun	3 dok
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	Realisasi adminsitasi keuangan dibagi target perencanaan administrasi keuangan dikalikan 100	100%
Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	Realisasi adminsitasi umum dibagi target perencanaan administrasi umum dikalikan 100	100%
Pengadaan BMD penunjang urusan PD	Prosentase terpenuhinya pengadaan BMD	Realisasi pengadaan BMD dibagi target perencanaan pengadaan BMD dikalikan 100	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	Realisasi penyediaan jasa penunjang urusan kantor dibagi target perencanaan penyediaan jasa penunjang dikalikan 100	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	Realisasi pemenuhan BMD yang layak oeprasional dibagi target perencanaan pemenuhan BMD dikalikan 100	100%

Sumber : DPA, 2024

III. EVALUASI KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja

a. Capaian IKT

Capaian kinerja utama ini mendukung capaian indikator indikator kinerja tujuan BPBD dan indikator RPJMD SB yaitu :

- menurunkan indeks risiko bencana. Tahun 2023 dengan capaian 136,90 dengan sumber data dari hasil evaluasi 71 indikator dan 284 pertanyaan penilaian indikator yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana setiap tahunnya.
- hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap reformasi birokrasi yang difasilitasi Inspektorat dengan nilai 83,3. Hasil pengukuran kinerja dilakukan setahun sekali oleh pihak eksternal yaitu untuk indeks risiko bencana dinilai oleh BNPB dan PMPRB oleh MENPAN RB. Data seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Capaian IKT 2021-2024

No	Tujuan	Indikator	Realisasi / tahun		
			2022	2023	2024-II
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi Bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	153,3	136,9	Terbit awal tahun berikutnya
2	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Hasil evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	83,3	83,3	Terbit akhir tahun

Sumber : Data diolah,2024

b. Capaian IKU

BPBD dalam mencapai 2 (dua) kinerja utama di tahun 2024 sudah mampu 94,08% (rincian perhitungan terlampir). Hasil analisis sebagai berikut :

- Semua usulan atau pengaduan masyarakat akan kebencanaan telah dapat dilayani/ diselesaikan secara administarsi oleh manajemen BPBD dan secara teknis oleh TRC (Tim Reaksi Cepat) BPBD dengan dukungan 35 orang personal yang bertugas dua sip yang terbagi 4 (empat) regu sehingga 24 jam personal TRC siaga.
- Akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dinilai oleh Isepktorat melalui dokumen LKjIP sebagai bagian dari dokuemn SAKIP sudah memperoleh nilai sesuai LHE : 62,25 atau B yang dikeluarkan nilainya tahun 2022 dan dengan nilai 70,41 atau BB yang dikeluarkan nilainya di tahun 2023 dan nilai LKjIP tahun 2023 yang dinilai oleh Inspektorat di tahun 2024 dikeluarkan nilainya dalam LHE : 71,41 atau BB. Hasil pengukuran kinerja seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Capaian IKU 2021-2024

No	Sasaran	Indikator	Realisasi / tahun		
			2022	2023	2024-II
1	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LkjIP	B	BB	BB

Sumber : Data diolah, 2024

c. Capaian IKP

Pencapaian indikator kinerja dua program sudah 75% (rincian perhitungan terlampir) Hasil analisis sebagai berikut :

- persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD dengan realisasi keuangan 35,42% dan fisik layanan administrasi dan kelancaran pelayanan publik 50% .
- prosentase penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana dengan realisasi anggaran 23,92% dan fisik layanan sudah terealisasi 100% dengan waktu tanggap bencana 24 jam 7 hari kerja. Hasil pengukuran kinerja seperti tabel berikut ini

Tabel 3.3 Capaian IKP 2021-2024

No	Program	Indikator	Reaalisasi / tahun		
			2022	2023	2024-II
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	100%	50%
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	100%	100%	100%

Adapun dukungan dalam mencapai kinerja program dengan 9 kegiatan prioritas (rincian perhitungan terlampir). Adapun hasilnya seperti berikut ini.

Tabel 3.4 Capaian IKK 2023-2024

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi / tahun	
			2023	2024 sd II
1	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 kec	10 kec
2	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	20%
3	Kegiatan pelayaan	Prosentase penanganan	100%	100%

	penyelamatan dan evakuasi korban bencana	darurat bencana pada setiap kejadian bencana		
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dok	0 dok
5	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 doku men	2 dok
6	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	35,42%
7	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	100%	39,31%
8	Pengadaan BMD penunjang urusan PD	Persentase pengadaan barang BMD yang layak operasional	0%	Tidak dapat dana
9	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	24,36%
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	100%	43,11%

Sumber : Data PPTK, 2024

Dari tabel diatas dapat dianalisis :

a. Capaian Kinerja Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus berupaya melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagai suatu investasi bagi semua stakeholder dengan fokus pada masyarakat desa sesuai tujuan pemerintan yaitu terwujudnya Tabanan tangguh dari desa. Adapun hasil kerja yang dilakukan periode Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut :

- disebarluaskannya informasi lainnya melalui facebook, website, dan media lainnya di daerah rawan bencana (pesisir pantai dan pegunungan / daerah teridentifikasi rawan bencana).
- persiapan penguatan kelembagaan yang tahun 2024 difokuskan di Desa Antap dan Desa Lalanglinggah. Dua desa ini didorong menguatkan kelembagaan desa siaga bencana menuju desa tangguh bencana mandiri.
- simulasi penanggulangan bencana bagi anak SMP dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kecamatan Kediri

Pengumpulan data pencegahan bencana yang diusulkan masyarakat / program pemerintah melalui edukasi dan sosialisasi direkap dan dilaporkan setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan pimpinan daerah.

b. Capaian Tanggap Bencana dan Penyaluran Logistik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 dan Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat info masuk kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Untuk memenuhi serangkaian kegiatan tersebut disepakati durasi waktu Tanggap maksimal 24 jam agar kejadian segera dapat penanganan awal.

Koordinasi data dengan instansi terkait (instansi pemerintah, TNI, Polri, PMI, Satgas, Forum, Swasta, Tagana, Basarnas, desa, dan lainnya). Pengumpulan data kebencanaan dan pelayanannya berbasis aplikasi yang diinput sebagai hasil Tim Reaksi Cepat dalam menangani permohonan masyarakat yang terdampak bencana atau berisiko terdampak bencana. Data tersebut selain dapat diketahui setiap hari juga direkap dan dilaporkan setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan pimpinan daerah (Bupati, Gubernur, BNPB). Adapun rekap data tanggap bencana seperti berikut ini.

Tabel 3.5 Kejadian bencana dan reaksi cepat penanganan bencana BPBD

No	Kejadian bencana	Tahun/ kejadian			Keterangan
		2022	2023	2024 sd TW-1I	
1	Pohon tumbang	155	36	84	Semua tertangani
2	Tanah longsor	219	22	15	Semua tertangani
3	Kebakaran	39	8	3	Semua tertangani
4	Gempa bumi	0	0	0	Semua tertangani
5	Banjir	62	0	2	Semua tertangani
6	Lain-lain	71	15	47	Semua tertangani
	Jumlah kejadian	499	81	151	Semua tertangani

Sumber : Laporan TRC, 2024

c. Capaian Rekonstruksi dan Rehabilitasi

BPBD telah membentuk Tim sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 180/36/HK/01/2024 tentang Pembentukan Tim Kajian dan Kebutuhan Pasca Bencana

Verifikasi administrasi dan lapangan dilakukan oleh Tim untuk dibuatkan kajian kebutuhan pascabencana dan kajian tersebut dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD yang memuat uraian kejadian bencana/musibah, nama pemohon, nilai kerusakan dan usulan bantuan. Periode Januari sd Juni 2024 sudah 141 titik

lokasi disurvei dan dibuatkan kaji cepat pasca bencana (rincian data perhitungan terlampir)

4.2 Kinerja Keuangan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2024 maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024 maka BPBD mengelola anggaran Rp. 4.290.580.430,00 yang terbagi menjadi belanja operasi sebesar Rp. 4.290.580.430,00, atau 100,0% dan belanja modal sebesar Rp.0,00 (0,00%).

Hasil evaluasi menunjukkan masih ada tiga kegiatan yang belum ada realisasi atau belum terbit SP2D namun SPJ dan SPM sudah diajukan ke Badan keuangan Daerah. Masih rendahnya realisasi disadari oleh diperlakukannya sistem baru dalam penatausahaan belanja sehingga aparatur masih terus mendalamai proses yang benar sesuai SAP. Data keuangan disajika seperti berikut ini.

Tabel 3.6 Realisasi keuangan

No	Program/Kegiatan	Pagu / Rp	Realisasi/Rp	%
A	Program penanggulangan bencana	437.230.000	98.272.615	22,48
1	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	14.780.000	11.364.840	76,89
2	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	93.678.000	23.375.875	24,95
3	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	313.763.000	59.522.100	18,97
4	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	15.000.000	4.009.800	26,73
B	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.853.350.430	1.965.573.496	51,01
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.406.000	2.565.950	58,04
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2.652.915.000	1.461.436.065	55,09
3	Administrasi umum Perangkat Daerah	61.603.280	32.888.974	53,39
4	Pengadaan BMD penunjang urusan PD	0	0	0
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.015.058.800	410.942.907	40,49
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.367.350	57.739.600	40,37
	Total	4.290.580.430	1.469.488.631	48,10

Sumber ; LRA, 2024

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengumpulkan dan menyusun rencana evaluasi pengukuran indikator kinerja tujuan, indikator kinerja utama, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, dan indikator kinerja keuangan.
- b. Capaian kinerja telah dievaluasi secara berkala. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diukur sampai dengan triwulan II melalui capaian indikator kinerja utama (IKU) sudah mencapai sebesar 94,08% yang didukung oleh capaian indikator kinerja program (IKP) dalam Renja dengan rata-rata capaian outcome sebesar 75,0%, serta didukung dari capaian kinerja kegiatan (IKK) dengan rata-rata capaian output sebesar 53,74%.
- c. Capaian kinerja keuangan secara umum adalah 48,10% yang terdiri dari capaian kinerja program penanggulangan bencana sebesar 22,48% dan realisasi kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar 51,01%.

5.2 Saran

Dari uraian hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran strategis yang akan dilaksanakan tahun berikutnya dan dukungan pendanaan pada masing-masing sasaran strategis sehingga kinerja dapat lebih dioptimalkan.
- b. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* sehingga kinerja pembangunan semakin meningkat.



Lampiran

DATA KINERJA PROGRAM

No	Program	Indiaktor	Perhitungan	Target	Kinerja	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Tersedia 50% Target 100%	100%	50%	50,0
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Semua usulan / aduan diprogres	100%	100%	100
	Rata-rata					75,0

DATA KINERJA KEGIATAN

No	Program	Indiaktor	Perhitungan	Target	Kinerja	%
1	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	Target 10 kec	10 kec	10 kec	100
2	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Gladi dan simulasi 20% Target 100%	100%	20%	20,0
3	Kegiatan pelayaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	Semua call cetre terlayani	100%	100%	100
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	Hasil kaji cepat verifikasi pasca bencana	1 dok	1 dok	0
4	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Tersedia Renja dan LkjIP dan berproses Laporan evaluasi triwulanan	3 dok	2 dok	66,7
5	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	Realisasi belanja 15,7% dari pagu 100%	100%	39,31%	55,09
6	Administrasi umum	Persentase	Pelayanan	100%	33,87%	53,39

	Perangkat Daerah	terpenuhinya administrasi umum BPBD	33,87% dari target 100%			
7	Pengadaan BMD penunjang urusan PD	Persentase pengadaan barang BMD yang layak operasional	Tidak dapat dana	Tidak dapat dana	Tidak dapat dana	-
8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	Pembayaran upah Non PNS dibagi 100%	100%	24,36%	40,48
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	Servis BMD 20% dari target 100%	100%	43,11%	48,37
	Rata-rata					53,74

Sekretaris BPBD
Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan

Agung Raka Bhakta Wirawan,S.Pi,MMA.
NIP. 19760608 200212 1 009